



LAPORAN KINERJA

Tahun 2021

Biro Kesekretariatan Pimpinan

Sekretariat Jenderal DPR RI



Email:

biropimpinan1@gmail.com



Office:

Gedung Setjen
DPR RI Lantai 3



Phone:

021-5715739

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, taufik, dan karunia-Nya, walaupun di tengah-tengah Pandemi Covid-19, kita masih diberikan kesehatan untuk mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekaligus menyelesaikan Buku Laporan Kinerja (LKj) Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR-RI melalui Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Tahun 2021 menyajikan berbagai capaian strategis dan keberhasilan di Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selain dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan peningkatan kinerja menuju terwujudnya *Good Governance*, buku ini juga menjadi media pertanggungjawaban kepada publik.

Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Penyusun dan seluruh jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan atas kerja keras serta dedikasinya sehingga apa yang kita kerjakan bersama dapat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, yaitu terwujudnya Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami membuka diri terhadap berbagai masukan, baik kritik, saran maupun pandangan konstruktif yang ditujukan untuk kesempurnaan Laporan Kinerja ini, khususnya untuk pembuatan Laporan Kinerja selanjutnya karena Laporan Kinerja ini akan terus mengikuti perkembangan dinamika sesuai dengan perubahan yang terjadi di lembaga legislatif kita.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 10 Januari 2022

Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan,

Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP 197111051998031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas, Biro Kesekretariatan Pimpinan, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun dalam mengelola anggaran 2021, telah menyusun Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021. Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sekaligus sebagai *feedback* dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Selain itu, laporan kinerja ini juga merupakan media untuk mengomunikasikan pencapaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan, khususnya kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan pemangku kepentingan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Persidangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dan dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

Capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dari capaian kinerja Satker Dewan dan Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Satker Dewan Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh DPR RI	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan	6 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	83,33%
2.	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah rekomendasi kebijakan Pimpinan DPR RI	40 rekomendasi kebijakan	53 rekomendasi kebijakan	132,5%

Sementara, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat sebagai berikut.

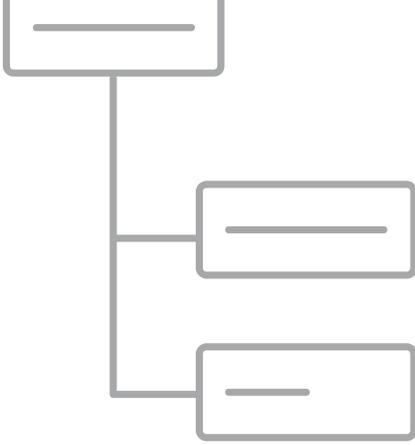
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai standar	100%	100%	100%
	4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,31	3,13	94,56%
	5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	92,5%	96,64%	104,47%
Total				99,80%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator di atas, pengukuran capaian sasaran kegiatan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah 99,80%. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Dengan demikian, hasil capaian kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Alokasi anggaran Satker Dewan Tahun 2021 Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebesar Rp114.517.261.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.051.640.720,00 atau 73,40%. Sementara, untuk alokasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis unit kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah sebesar Rp8.172.970.000,00. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan Desember 2021, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp7.897.995.594,00 dengan persentase 96,64%.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan secara keseluruhan, yaitu perlu dilakukan upaya-upaya, sebagai berikut:

1. Terus mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional.
2. Terus mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standard yang berlaku.
3. Terus mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib.
4. Terus mengupayakan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Gambaran Umum	9
1.1.1 Kelembagaan	10
1.1.2 Struktur Organisasi	11
1.1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia	12
1.2 Peran Strategis	16
1.3 Permasalahan Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	18
2.2 Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian Kinerja	23
3.1.1 Pengukuran Kinerja	23
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan	12
Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	14
Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia	15
Tabel 5 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 Satker Dewan.....	21
Tabel 7 Anggaran Satker Dewan	21
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 Satker Setjen	21
Tabel 9 Anggaran Satker Setjen	22
Tabel 10 Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021	24
Tabel 11 Capaian Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pimpinan	29
Tabel 12 Dokumen Persidangan Bamus	30
Tabel 13 Capaian Kinerja Badan Musyawarah.....	31
Tabel 14 Dokumen Persidangan Muspim	32
Tabel 15 Capaian Kinerja Rapat-rapat Musyawarah Pimpinan.....	32
Tabel 16 Dokumen Persidangan TU Pimpinan Setjen.....	33
Tabel 17 Capaian Kinerja Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen.....	34
Tabel 18 Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	35
Tabel 19 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	37
Tabel 20 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 dan realisasinya	37
Tabel 21 Capaian Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Satker Dewan).....	38
Tabel 22 Capaian Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen (Satker Setjen).....	40
Tabel 23 Capaian Kinerja Satker Dewan.....	42
Tabel 24 Capaian Kinerja Satker Setjen	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan	12
Gambar 2 Data Pegawai Di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan.....	13
Gambar 3 Bagan Program Berdasarkan Satuan Kerja (Satker)	24



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang secara umum memiliki tugas dan fungsi melakukan dukungan dan pelayanan terhadap Pimpinan DPR RI. Sebagai bagian dari Setjen, Biro Kesekretariatan Pimpinan merupakan unsur penting di dalam menunjang kinerja Pimpinan DPR RI. Sebagai aparatur pemerintahan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dituntut melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana instansi pemerintahan lainnya. Artinya bahwa jajaran Biro Kesekretariatan Pimpinan harus dapat akuntabel serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (2020 – 2024) dimana arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan mewajibkan setiap instansi pemerintah mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Strategi dalam jangka menengah (5 tahun), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja yang merupakan kontrak kinerja, serta laporan pertanggungjawaban kinerja tiap tahunnya. Penyusunan laporan kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dalam kerangka itulah, penyusunan Laporan Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan yang diamanahkan selama kurun waktu 1 tahun yang memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada masa yang akan datang.

1.1.1 Kelembagaan

Sekretariat Jenderal DPR RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020, untuk Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta dukungan persidangan Badan Musyawarah. Adapun kelembagaan Biro Kesekretariatan Pimpinan diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, terakhir diubah melalui Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

Fungsi yang melekat pada Biro	penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dukungan kesekretariatan pimpinan
Kesekretariatan Pimpinan	pelaksanaan kegiatan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dukungan pelaksanaan tugas Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Badan Musyawarah
	pelaksanaan dukungan rapat dan tata usaha Musyawarah Pimpinan
	pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal
	pelaksanaan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi
	penyusunan laporan kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan
	pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.
	penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

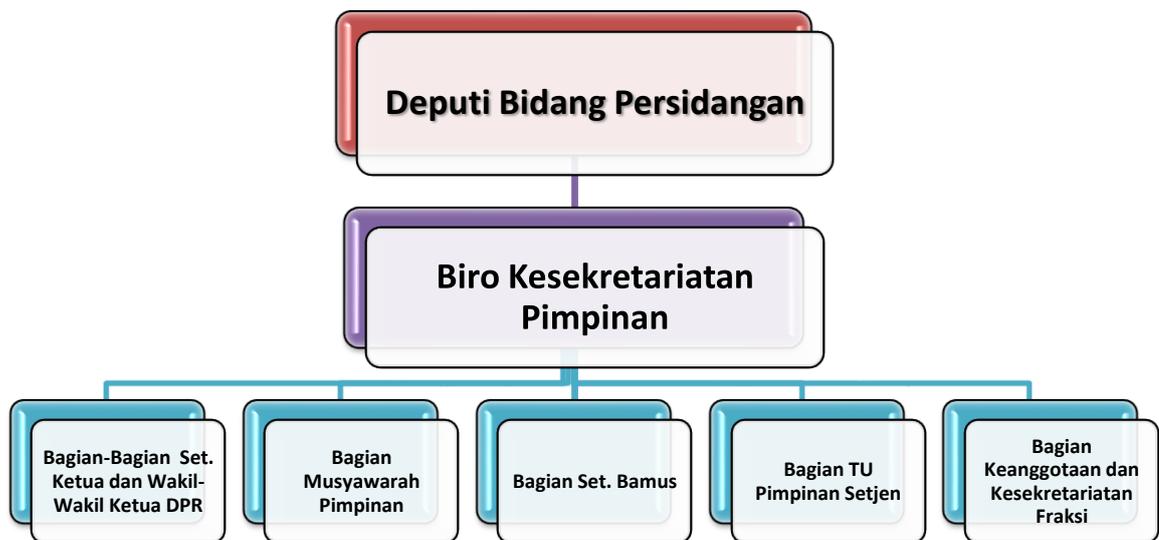
1.1.2 Struktur Organisasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun unit-unit kerja yang berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
2. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
3. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
5. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
6. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
7. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.
8. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 4 (empat) Kasubag.
9. Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi; terdiri dari 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag.

Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan secara keseluruhan tertuang dalam gambar dibawah ini

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan



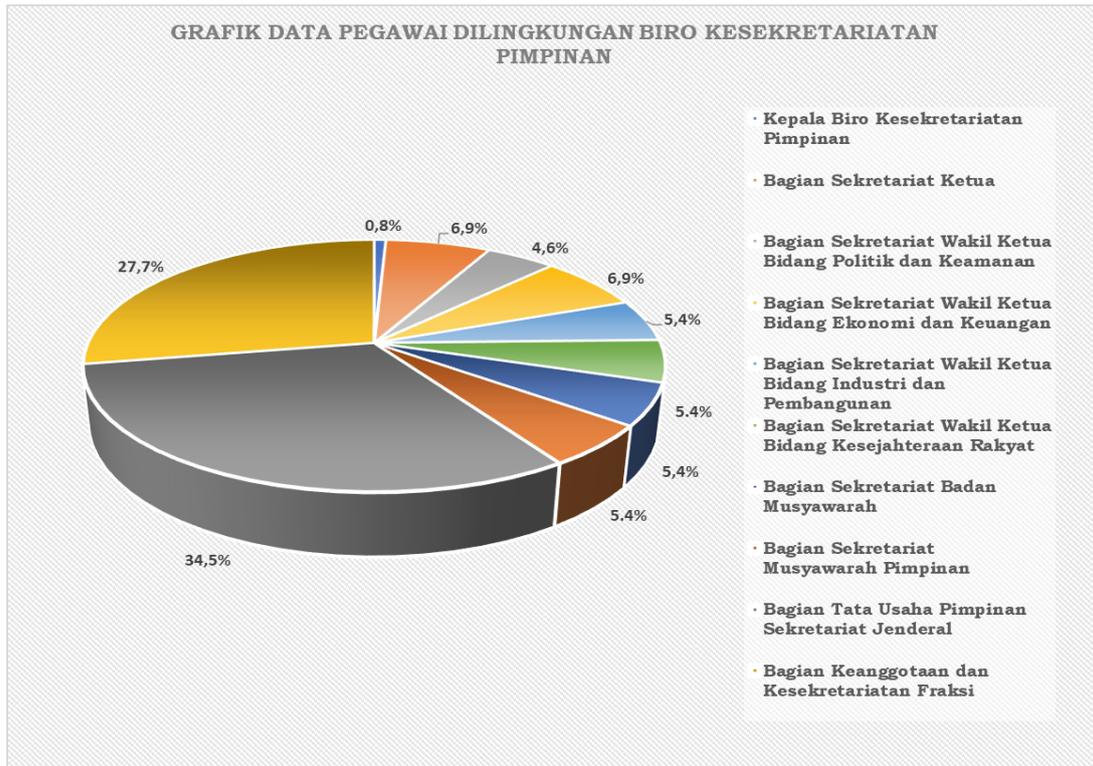
1.1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia

Keseluruhan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan berjumlah 130 (seratus empat) orang, yang tersebar di 9 (sembilan) Bagian unit kerja, adapun secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan

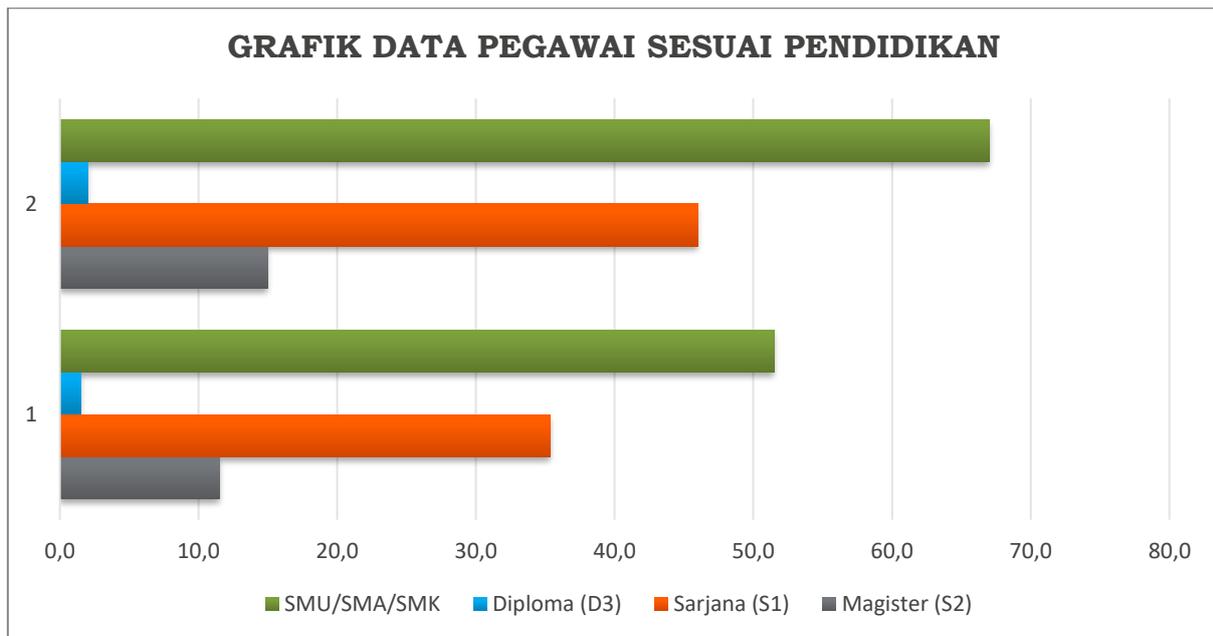
JABATAN/BAGIAN	%	JUMLAH
Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	0,8	1
Bagian Sekretariat Ketua	6,9	9
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan	4,6	6
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	6,9	9
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan	5,4	7
Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat	5,4	7
Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	5,4	7
Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	5,4	7
Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal	31,5	41
Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	27,7	36
Jumlah Pegawai di lingkungan Biro Pimpinan		130

Gambar 2 Data Pegawai Di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan



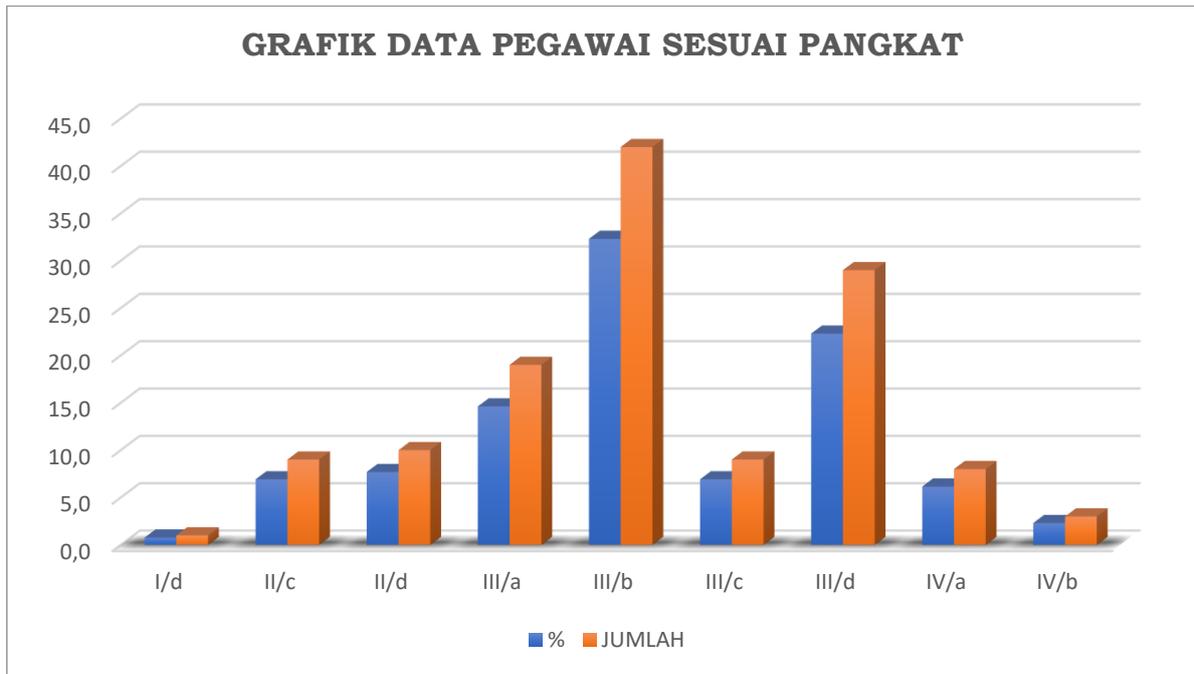
Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	%	JUMLAH
Magister (S2)	11,5	15
Sarjana (S1)	35,4	46
Diploma (D3)	1,5	2
SMU/SMA/SMK	51,5	67
Jumlah		130



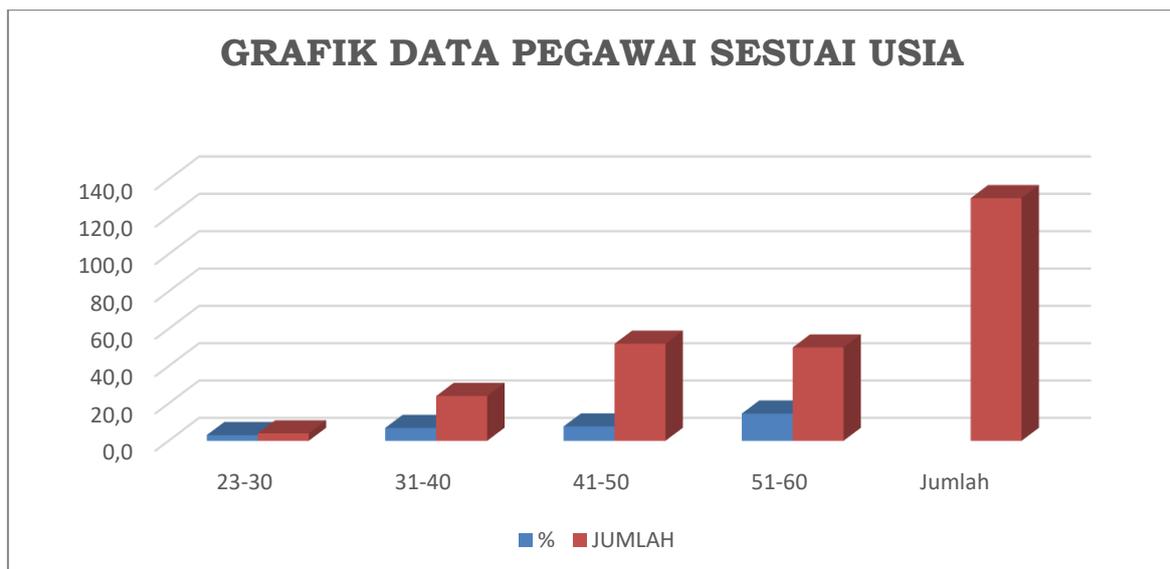
Tabel 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

PANGKAT	%	JUMLAH
I/d	0,8	1
II/c	6,9	9
II/d	7,7	10
III/a	14,6	19
III/b	32,3	42
III/c	6,9	9
III/d	22,3	29
IV/a	6,2	8
IV/b	2,3	3
Jumlah		130



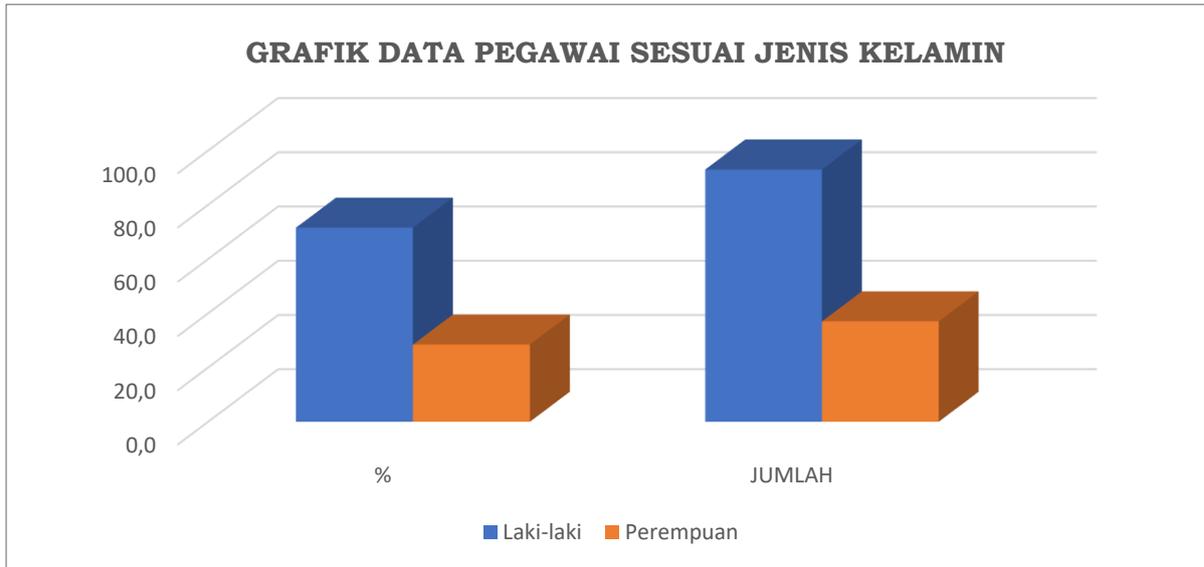
Tabel 4 Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

USIA	%	JUMLAH
23-30	3,1	4
31-40	6,9	24
41-50	7,7	52
51-60	14,6	50
Jumlah		130



Tabel 5 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

USIA	%	JUMLAH
Laki-laki	71,5	93
Perempuan	28,5	37
Jumlah		130



1.2 Peran Strategis

Peran Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam mewujudkan dan mengimplementasikan tujuan dalam renstra Setjen DPR RI serta visi dan misi dari deputi Bidang Persidangan yaitu memiliki peran yang sangat strategis yaitu mendukung penyelenggaraan rapat-rapat yang mana keputusannya merupakan keputusan mengikat artinya keputusan rapat yang dihasilkan dalam Rapat-rapat merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota DPR dan AKD sehingga kecepatan, ketepatan serta kualitas kerja SDM di Lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan harus maksimal dan berkualitas serta Profesional sehingga mencerminkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

1.3 Permasalahan Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro kesekretariatan pimpinan yaitu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dimana dari segi kuantitas sumber daya manusia sebanyak 130 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) Bagian/unit kerja sudah memadai. Besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan usia, mengingat usia di atas 40 tahun berjumlah 52 Orang (7.7%) dan Usia 50 tahun sebanyak 50 orang (14,6%) dari total sumber daya manusia di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimana semakin tinggi usia tentu berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan penguasaan teknologi yang sangat cepat, karena SDM merupakan modal utama untuk menggerakkan mesin Organisasi disamping tugas dan fungsi Biro Kesekretarian Pimpinan secara teknis bersinggungan langsung dengan Tugas dan fungsi Pimpinan DPR RI serta tugas-tugas Anggota DPR RI di AKD, untuk itulah strategi yang dikedepankan adalah meningkatkan SDM dalam hal penguasaan teknologi guna memberikan dukungan kepada kegiatan AKD sesuai dengan perkembangan terkini, serta meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kualitas hasil kerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2019-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Biro Kesekretariatan Pimpinan tidak merumuskan visi dan misi sendiri, karena visi dan misi ada pada satu lembaga, yaitu visi dan misi Sekretariat Jenderal, dan organisasi dibawahnya menjalankan program-program yang dituangkan dalam visi tersebut. Sesuai dengan kedudukannya visi Sekretariat Jenderal DPR RI yang dirumuskan dan diturunkan melalui program kerja Deputi Bidang Persidangan akan menjadi pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Biro Kesekretariatan Pimpinan. Oleh karena itu apa yang akan dicapai oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan program Deputi Bidang Persidangan.

Adapun visi Deputi Bidang Persidangan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yaitu:

“Menjadi Deputi Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Profesional artinya Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan modern berarti memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal DPR RI yang didukung oleh Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan jajarannya berkinerja lebih tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Atas dasar hal tersebut melalui Deputi Bidang Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan dukungan Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta Pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Misi Deputi Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputi Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu dan berpegang teguh pada Visi dan Misi Deputi Bidang Persidangan DPR RI tersebut dan berupaya untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha dan kerumahtanggaan Pimpinan Dewan;
- b. Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan, Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Bamus yang optimal; dan

- c. Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal.

3. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, sesuai dengan tujuan Deputy Bidang Persidangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) terwujudnya dukungan persidangan, administrasi yang tepat, cepat, dan akurat yang dibutuhkan oleh DPR RI;
- 2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih;
- 3) terwujudnya dukungan keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.

4. Sasaran

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program. Oleh karena itu, sasaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sesuai dengan program Deputy Bidang Persidangan, diantaranya:

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target			
			2021	2022	2023	2024
Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen PR RI yang berkualitas	1	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	BB	A	A	A
	2	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan	1	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputy Bidang Persidangan	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan	BB	A	A	AA

	2	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	A	A
--	---	---	---	---	---	---

2.2 Perjanjian Kinerja

Biro Kesekretariatan Pimpinan telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021.

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 Satker Dewan

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengawasan	6 Rekomendasi Kebijakan
2	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pimpinan DPR RI	40 Rekomendasi Kebijakan

Tabel 7 Anggaran Satker Dewan

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Satker: Dewan	Rp.121.063.601.000,-
Program: Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp.121.063.601.000,-
Kegiatan: 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI 2. Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI	Rp. 26.282.778.000,- Rp.94.780.823.000,-

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 Satker Setjen

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SATKER SETJEN			
a.	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan	1. Persentase skenario, laporan kesimpulan tindaklanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan oleh DP RI. 2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindaklanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan	100% 100%

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	
		3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%
		4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,31
		5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	92,5%

Tabel 9 Anggaran Satker Setjen

SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Satker: Setjen	Rp.8.782.675.000,-
Program: Dukungan Manajemen	Rp.8.782.675.000,-
Kegiatan: Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan	Rp.8.782.675.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menyampaikan akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan, baik pada Satker Setjen maupun Satker Dewan pada Tahun Anggaran 2021, guna mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2021. Di samping itu, juga akan diuraikan akuntabilitas keuangan dari anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Satker Setjen dan Satker Dewan.

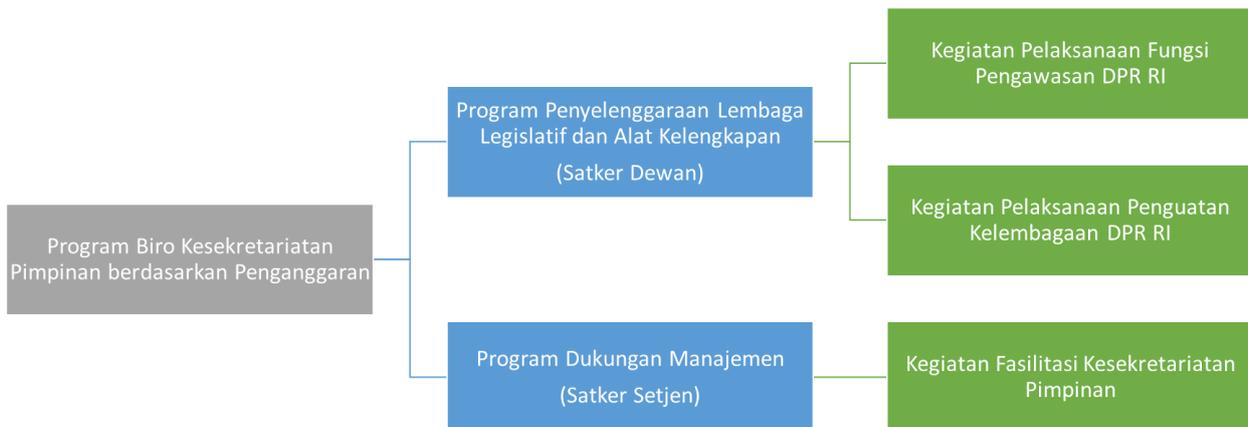
3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja akan mengungkapkan capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentunya Perjanjian Kinerja tahun 2021 menjadi acuan pengukuran capaian kinerja pada tahun berjalan.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan beberapa cara pengukuran, di antaranya yaitu: (a) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang direncanakan; (b) Perbandingan dengan tingkat kinerja yang lalu; (c) Perbandingan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode jangka menengah; (d) Perbandingan dengan unit organisasi sejenis. Adapun pengukuran kinerja pada tahun 2021, menjadikan Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 sebagai acuan pengukuran, atau dengan kata lain pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan tingkat kinerja yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2021, Biro Kesekretariatan Pimpinan melaksanakan 2 (dua) program berdasarkan satuan kerja (Satker) penganggaran, yaitu:

Gambar 3 Bagan Program Berdasarkan Satuan Kerja (Satker)



Berdasarkan 2 (dua) program tersebut, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai indikator-indikator keberhasilan untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021. Adapun capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada Tahun 2021 seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 10 Capaian Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SATKER DEWAN					
1.	Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Pimpinan DPR RI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan.	6 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	83,33%
2.	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah Rekomendasi Pimpinan DPR RI.	40 Rekomendasi Kebijakan	53 Rekomendasi Kebijakan	132,5%
SATKER SETJEN					
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan	1. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak-	100%	100%	100%

NO.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pimpinan	lanjut hasil per-sidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan oleh DPR RI.			
		2. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%	100%	100%
		3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%	100%	100%
		4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,31	3,13	94,56%
		5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	92,5%	96,64%	104,47%

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dari perjanjian kinerja, baik Perjanjian Kinerja Satker Dewan maupun Perjanjian Satker Setjen yang telah ditetapkan tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.2.1 Capaian Kinerja Satker Dewan

Berdasarkan perjanjian kinerja Satker Dewan, Biro Kesekretariatan Pimpinan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu kebijakan pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan Pemerintah oleh DPR RI dan keputusan Pimpinan DPR RI, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.



Sasaran ke-1 dari Perjanjian Kinerja Satker Dewan Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh DPR RI dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengawasan. Target yang ingin dicapai dari indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 6 rekomendasi kebijakan dan terealisasi sebanyak 5 rekomendasi kebijakan sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 83,33%. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan diukur dengan menghitung jumlah tim pengawasan yang dibentuk oleh DPR RI dan dipimpin langsung oleh Pimpinan DPR RI, yang telah melaksanakan kegiatan selama tahun 2021.

Adapun tim-tim pengawasan DPR RI yang telah melaksanakan kegiatan selama tahun 2021 dan telah didukung oleh unit kerja di lingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan sebanyak 5 tim, yaitu:

1. **Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**, berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2019-2020. Adapun kegiatan timwas tersebut di tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat-rapat/RDPU	3
2.	Mengundang Pakar	2
3.	Kunjungan Kerja dalam negeri/Penugasan	17
4.	Kunjungan kerja luar negeri	-
5.	Kegiatan konsinyering	3

2. **Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana**, berdasarkan keputusan DPR RI Nomor 6/DPR RI/II/2019-2020. Adapun kegiatan timwas tersebut di tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat-rapat/RDPU	2
2.	Mengundang Pakar	5
3.	Kunjungan Kerja dalam negeri/Penugasan	17
4.	Kunjungan kerja luar negeri	-
5.	Kegiatan konsinyering	-

3. **Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta**, berdasarkan Keputusan DPR RI No.2/DPR RI/II/2019-2020. Adapun kegiatan tim tersebut di tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat-rapat/RDPU	2
2.	Mengundang Pakar	-
3.	Kunjungan Kerja dalam negeri/Penugasan	5
4.	Kunjungan kerja luar negeri	-
5.	Kegiatan konsinyering	-

4. **Tim Implementasi Reformasi (TIR) DPR RI**, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR RI/II/2019-2020. Adapun kegiatan tim tersebut di tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat-rapat/RDPU	3
2.	Mengundang Pakar	-
3.	Kunjungan Kerja dalam negeri/Penugasan	1
4.	Kunjungan kerja luar negeri	-
5.	Kegiatan konsinyering	-

5. **Tim *Open Parliament Indonesia (OPI)* DPR RI**, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 12/DPR RI/II/2019-2020. Adapun kegiatan tim tersebut di tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Rapat-rapat/RDPU	3
2.	Mengundang Pakar	-
3.	Kunjungan Kerja dalam negeri/Penugasan	1

4.	Kunjungan kerja luar negeri	-
5.	Kegiatan konsinyering	-



Sasaran ke-2 dari Perjanjian Kinerja Satker Dewan Biro Kesekretariatan Pimpinan adalah Keputusan Pimpinan DPR RI dengan indikator kinerja, yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pimpinan DPR RI. Target yang ingin dicapai dari indikator ini pada tahun 2021 sebanyak 40 rekomendasi kebijakan dan terealisasi sebanyak 53 rekomendasi kebijakan sehingga diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 132,5%. Jumlah rekomendasi kebijakan Pimpinan DPR RI diukur dengan menghitung jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan (Muspim) dan Bagian Sekretariat Badan Musyawarah (Bamus) selama tahun 2021. Kegiatan rapat-rapat tersebut diselenggarakan oleh Pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Badan Musyawarah telah melakukan Rapat Bamus/Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus sebanyak 15 kali rapat. Adapun Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan telah melaksanakan dukungan penyelenggaraan Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi, serta Rapat/Pertemuan Konsultasi sebanyak 38 kali rapat sehingga total rapat yang telah dilaksanakan oleh Muspim dan Bamus adalah sebanyak 53 rapat sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah. Rapat-rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang kemudian dijadikan kebijakan oleh Pimpinan DPR RI.

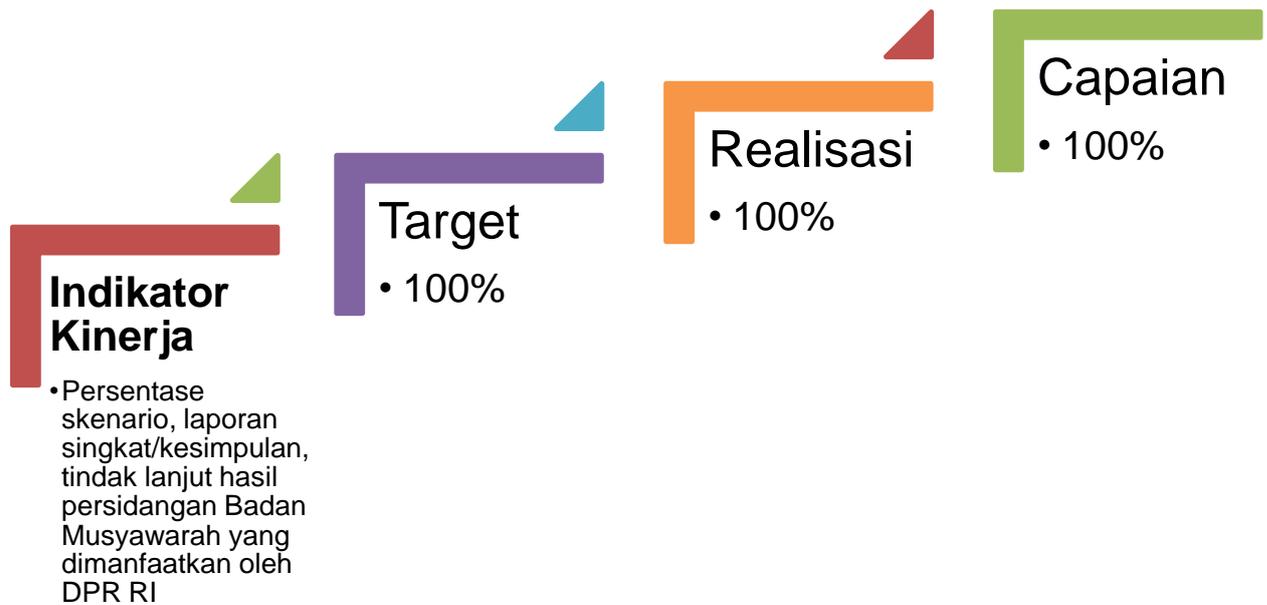
Tabel 11 Capaian Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pimpinan

No.	Jenis Rapat	Jumlah
1.	Rapat Pimpinan	14
2.	Rapat Koordinasi	5
3.	Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan AKD	6
4.	Pertemuan Konsultasi	13
5.	Rapat Bamus/Pengganti Rapat Bamus	15
Total		53

3.1.2.2 Capaian Kinerja Satker Setjen

Berdasarkan perjanjian kinerja Satker Setjen, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dilakukan Biro Kesekretariatan Pimpinan selama tahun 2021 berupa Sasaran/Program Kegiatan, yaitu meningkatnya kualitas dukungan Kesekretariatan Pimpinan yang terdiri dari 5 Indikator Kinerja, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%
2. Persentase skenario, laporan singkat/kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan oleh DPR RI.	100%
3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar.	100%
4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.	3,31
5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan.	92,5%



Indikator Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan yang berupa “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada Tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen). Adapun dukungan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Badan Musyawarah yang menyusun dokumen-dokumen rapat Badan Musyawarah berupa skenario, laporan kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah pada tahun 2021.

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 5 Masa Persidangan. Untuk itu pengukuran persentase tersebut dilakukan berdasarkan dokumen persidangan pada Badan Musyawarah yang ditargetkan sebesar 20% pada masing-masing masa persidangan, yang terdiri dari skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah. Adapun Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah pada saat skenario, laporan kesimpulan, dan tindak lanjut hasil persidangan diterima oleh Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

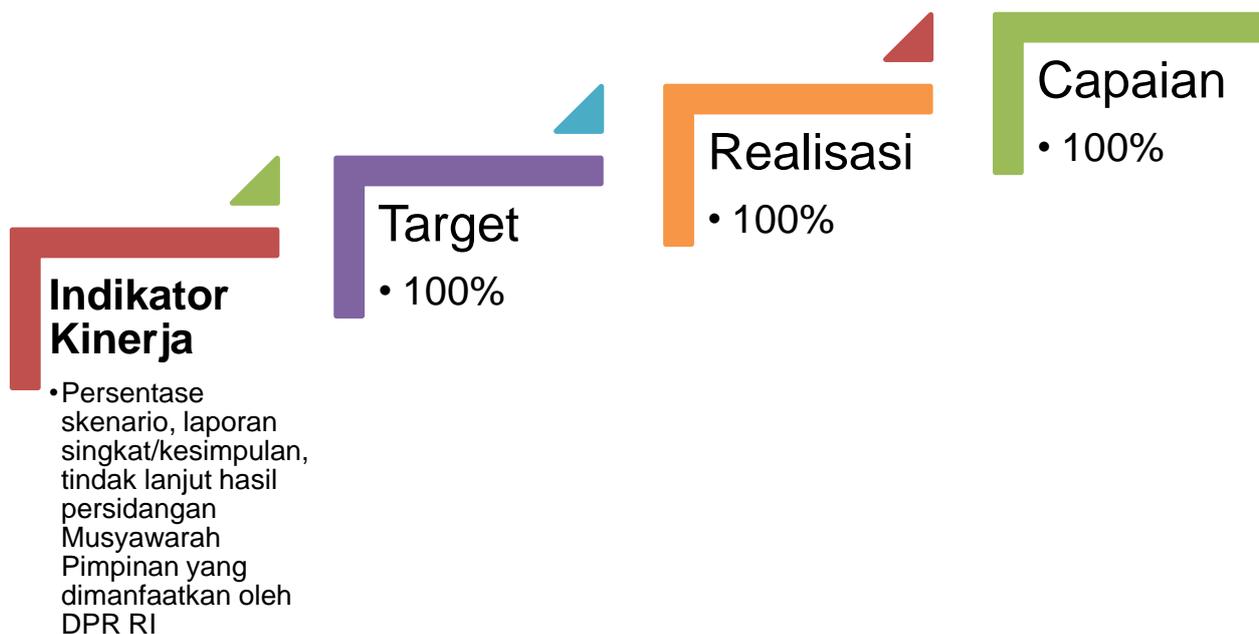
Tabel 12 Dokumen Persidangan Bamus

NO.	DOKUMEN PERSIDANGAN BAMUS	TARGET	CAPAIAN	%
1.	MP. III TS. 2020-2021	20%	20%	100%
2.	MP. IV TS. 2020-2021	20%	20%	100%
3.	MP. V TS. 2020-2021	20%	20%	100%
4.	MP. I TS. 2021-2022	20%	20%	100%

5.	MP. II TS. 2021-2022	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Tabel 13 Capaian Kinerja Badan Musyawarah

NO	JENIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat Bamus/Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus	20	15	75%
2.	Penerbitan SK Pimpinan, SK Dewan, dan SK Sekjen	240	203	84,58 %



Indikator Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berupa “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada Tahun 2021, target yang ditetapkan 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen). Adapun dukungan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Musyawarah Pimpinan yang menyusun dokumen-dokumen rapat Musyawarah Pimpinan berupa skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan rapat-rapat pimpinan, rupa-rapat koordinasi, dan rapat-rapat konsultasi pimpinan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, seperti diketahui bahwa terdapat 5 masa persidangan. Sebagaimana indikator kinerja sebelumnya, pengukuran persentase tersebut dilakukan berdasarkan dokumen persidangan pada Badan Musyawarah yang ditargetkan sebesar 20% pada masing-masing masa persidangan yang terdiri dari skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan. Sedangkan kriteria

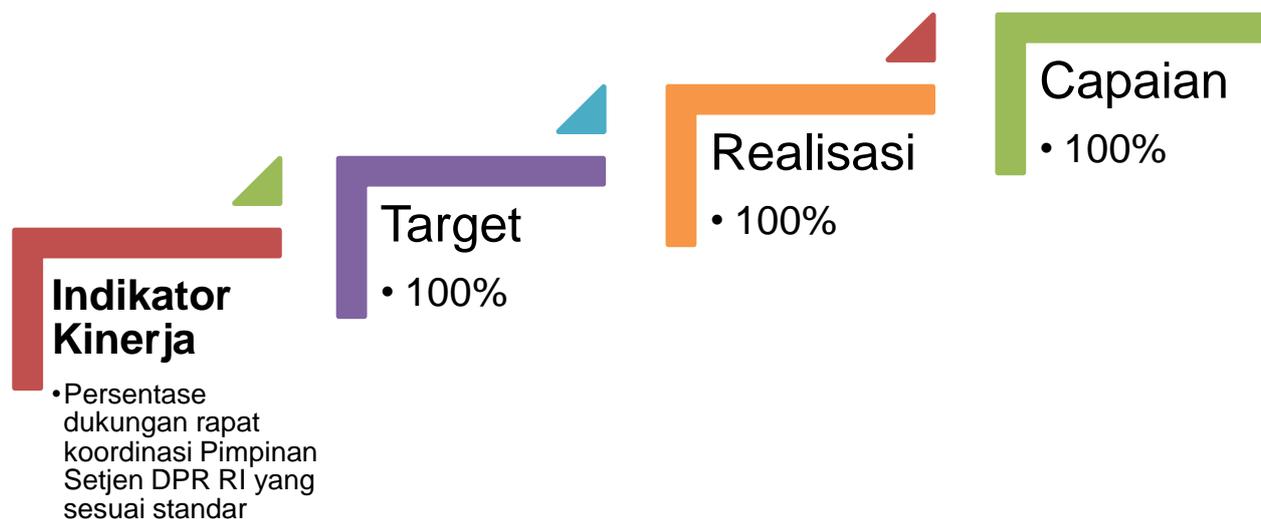
“dimanfaatkan DPR” adalah pada saat skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan diterima oleh Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Tabel 14 Dokumen Persidangan Muspim

NO	DOKUMEN PERSIDANGAN MUSYAWARAH PIMPINAN	TARGET	CAPAIAN	%
1.	MP. III TS. 2020-2021	20%	20%	100%
2.	MP. IV TS. 2020-2021	20%	20%	100%
3.	MP. V TS. 2020-2021	20%	20%	100%
4.	MP. I TS. 2021-2022	20%	20%	100%
5.	MP. II TS. 2021-2022	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Tabel 15 Capaian Kinerja Rapat-rapat Musyawarah Pimpinan

NO	JENIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Rapat Pimpinan	10	14	140%
2.	Rapat Koordinasi	10	6	60%
3.	Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan AKD	10	5	50%
4.	Pertemuan Konsultasi	10	13	130%



Indikator Kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan berupa “Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar” di Tahun 2021, target yang ditetapkan adalah 100% (seratus persen) dan telah terealisasi sebesar 100% (seratus persen). Adapun dukungan kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal selama tahun 2021.

Pada tahun 2021, pengukuran persentase dilakukan berdasarkan dokumen persidangan yang disusun oleh Bagian TU. Pimpinan Setjen DPR RI yang ditargetkan berupa 5 Laporan Kegiatan Pimpinan Setjen DPR RI, yang mana pada setiap masa persidangan terdapat 1 Laporan Kegiatan atau sebesar 20% pada masing-masing masa persidangan.

Tabel 16 Dokumen Persidangan TU Pimpinan Setjen

NO	DOKUMEN PERSIDANGAN TU PIMPINAN SETJEN	TARGET	CAPAIAN	%
1.	MP. III TS. 2020-2021	20%	20%	100%
2.	MP. IV TS. 2020-2021	20%	20%	100%
3.	MP. V TS. 2020-2021	20%	20%	100%
4.	MP. I TS. 2021-2022	20%	20%	100%
5.	MP. II TS. 2021-2022	20%	20%	100%
CAPAIAN KINERJA			100%	

Kelima dokumen Laporan Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen selama tahun 2021 tersebut dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Dokumen laporan dimaksud di antaranya meliputi tentang dokumen-dokumen pelaksanaan rapat, dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan rapat, dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dokumen konsep perencanaan dan realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja TU Pimpinan Setjen.

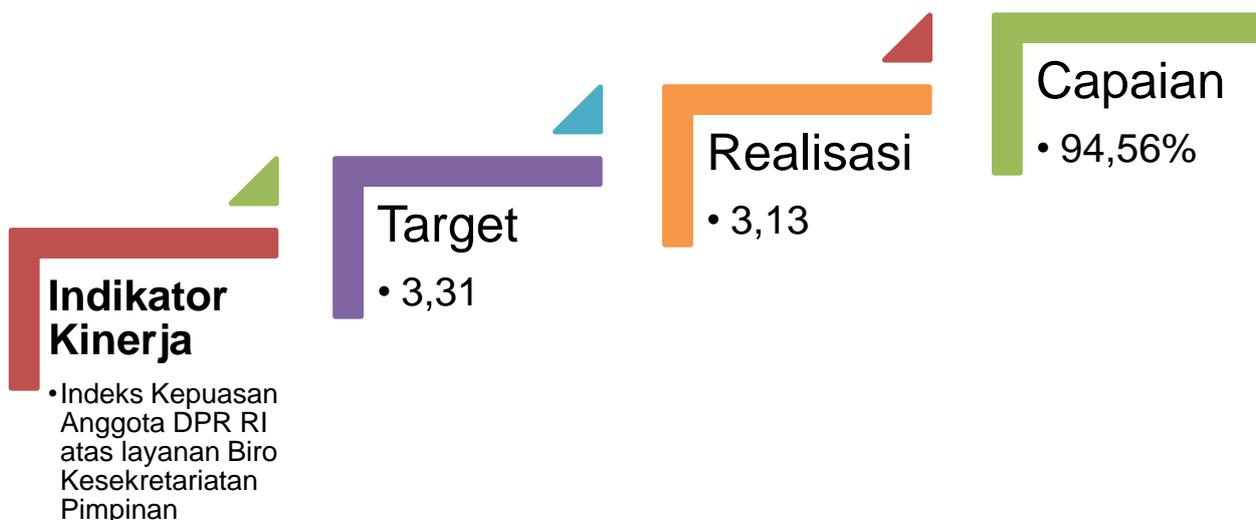
Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan dukungan kegiatan tentunya tidak hanya kepada Pimpinan DPR RI, namun juga kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, seperti Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan berupa persiapan penyelenggaraan rapat koordinasi, tindak lanjut rapat pimpinan, rapat koordinasi persiapan dan tindak lanjut rapat BURT, serta rapat

koordinasi Pimpinan Setjen. Sedangkan pada tingkat Deputi, telah dilaksanakan rapat koordinasi rencana kerja, rapat koordinasi monitoring kinerja, rapat koordinasi evaluasi kinerja, dan rapat koordinasi khusus penanganan hal-hal tertentu.

Disamping dukungan terhadap kegiatan rapat kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Kesekretariatan Pimpinan juga memberikan dukungan berupa kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan Setjen DPR RI, yang mencakup pengaturan tamu-tamu, dan perjalanan dinas Pimpinan Setjen. Keseluruhan kegiatan tersebut diikuti dengan dukungan kegiatan administrasi.

Tabel 17 Capaian Kinerja Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen

JENIS	RENCANA	REALISASI	%
Kegiatan Bagian TU Pimpinan Setjen:			
a. Rapat/Pertemuan Sekjen	80	167	208,75%
b. Rapat/Pertemuan Deputi Bidang Persidangan	64	62	96,87%
c. Rapat/Pertemuan Deputi Bidang Administrasi	86	85	98,83%



Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Berdasarkan Permenpan tersebut, Biro Kesekretariatan Pimpinan melakukan survei kepada pengguna (*user*), yaitu Pimpinan DPR RI dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Permenpan

tersebut. Survei dilakukan sebagai salah satu bentuk hasil evaluasi atas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada Pimpinan DPR RI.

Pengolahan data survei Kepuasan Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei berdasarkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis layanan yang diselenggarakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan. Adapun jenis layanan yang dilakukan pengukuran yaitu:

- a. Layanan Persidangan.
- b. Layanan Keahlian.
- c. Layanan Administrasi Keuangan.
- d. Layanan Administrasi Perjalanan Dinas.

Adapun unsur yang menjadi penilaian Biro Kesekretariatan Pimpinan, yaitu:

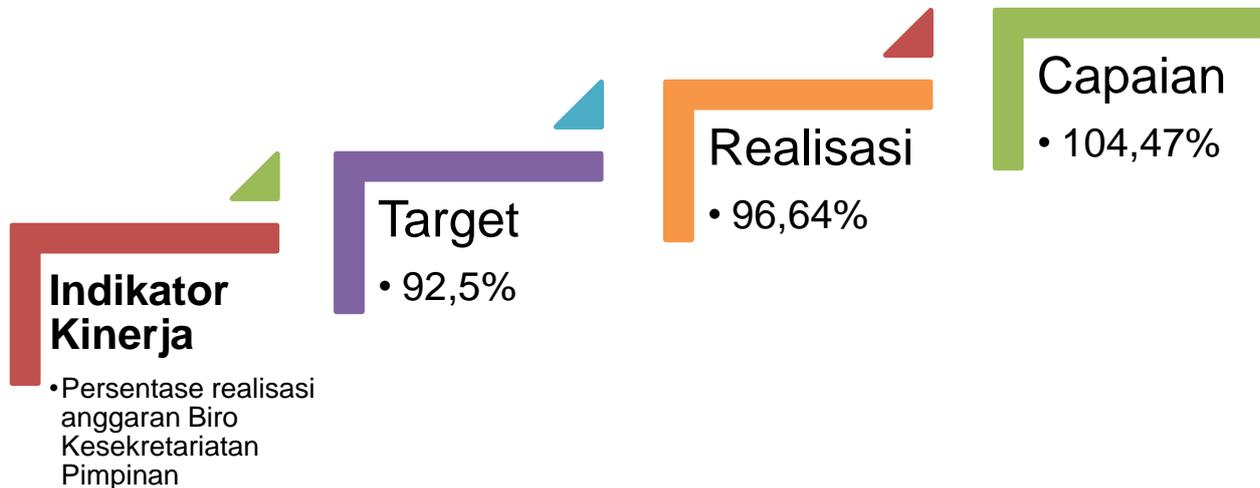
1. Sistem, mekanisme dan prosedur.
2. Waktu penyelesaian.
3. Produk spesifikasi jenis pelayanan.
4. Kompetensi dan perilaku SDM.
5. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
6. Sarana dan prasarana.

Hasil survei kepuasan Pimpinan DPR RI atas layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 18 Nilai Indeks Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan

NO	UNSUR SURVEI KEPUASAN	NILAI INDEKS KEPUASAN
1.	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,20
2.	Waktu penyelesaian.	3,15
3.	Produk spesifikasi jenis pelayanan.	3,25
4.	Kompetensi dan perilaku SDM.	3,30
5.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	2,80
6.	Sarana dan prasarana.	2,80
Indeks Komposit		3,13

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat tergambar bahwa hasil survei Kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan memperoleh skors 3,13 dengan nilai interval konversi 78,5 dan masuk dalam kategori baik dengan mutu pelayanan “B”.



Sebagaimana diketahui bahwa dukungan anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2021 meliputi dua Satuan Kerja (Satker) yaitu (1) Satker Dewan dan (2) Satker Setjen. Sedangkan Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya untuk Tahun 2021, memiliki 2 (dua) program kegiatan berdasarkan satuan kerja penganggaran yakni 1 (satu) program Satker Dewan dan 1 (satu) program Satker Setjen. Untuk Satker Dewan adalah Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan yang mana didalamnya terdapat kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dan pelaksanaan penguatan kelembagaan DPR RI. Sedangkan untuk Satker Setjen adalah Program Dukungan Manajemen yang mana didalamnya terdapat kegiatan fasilitasi kesekretariatan pimpinan.

Berdasarkan 2 (dua) satuan kerja diatas, kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan tertuang dalam indikator-indikator keberhasilan yang disusun untuk mencapai kinerja yang ingin diraih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Untuk melihat gambaran capaian dari indikator kinerja *Presentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan*, tentunya harus dilihat pada dua Satker tersebut. Dari kedua Satker tersebut, akan tergambar perbandingan antara pagu anggaran yang dialokasikan dan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan selama tahun 2021.

Tabel 19 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan

SATKER	PAGU	REALISASI	%
Satker Setjen	Rp.8.172.970.000,-	Rp.7.897.995.594,-	96,64%

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan pengukuran yang mengacu pada indikator-indikator kinerja sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka akuntabilitas kinerja Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tahun 2021 dapat dilakukan analisis terhadap capaian kerjanya. Dukungan anggaran pada Biro Kesekretariatan Pimpinan telah dilakukan revisi Program dan kegiatan untuk mengakomodasi kegiatan yang dilakukan Pimpinan DPR dan dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan demikian, kinerja yang disajikan adalah perbandingan antara realisasi dengan rencana kegiatan yang telah direvisi.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagai sistem pendukung kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI maka penggunaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa perubahan alokasi anggaran pada tahun 2021 dimaksudkan untuk mengadaptasi kegiatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam tahun 2021, utamanya dalam melakukan penyesuaian kondisi terhadap pandemi Covid-19.

Tabel 20 Perubahan Alokasi Anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan Tahun 2021 dan realisasinya

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Pagu Awal) Rp.	ANGGARAN (revisi akhir) Rp.	Realisasi Rp.	%
SATKER DEWAN					
1.	Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	121.063.601.000	114.517.261.000,-	84.051.640.720,-	73,40%
SATKER SETJEN					
1.	Dukungan Manajemen	8.782.675.000,-	8.172.970.000,-	57.996.767.419,-	96,64%

Tabel 21 Capaian Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan (Satker Dewan)

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2021	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan DPR RI)						
1.	Pelaksanaan Tugas Ketua DPR RI					
	Rp. 9.867.648.000	Rp. 6.626.933.709	67,16	Rp.14.863.451.000	Rp.10.887.730.038	73,25%
2.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	Rp.14.835.584.000	Rp. 14.674.032.310	98,91	Rp.16.812.726.000	Rp.12.294.967.600	73,13%
3.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	Rp. 10.593.223.000	Rp. 9.787.896.425	92,40	Rp.19.142.640.000	Rp.18.867.474.208	98,56%
4.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	Rp. 8.493.129.000	Rp. 6.982.784.500	82,22	Rp.10.575.946.000	Rp.8.075.940.600	76,36%
5.	Pelaksanaan Tugas Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	Rp. 10.192.561.000	Rp. 9.001.487.159	88,31	Rp.17.752.639.000	Rp.17.534.001.374	98,77%
6.	Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					
	Rp. 576.500.000	Rp. 531.765.000	92,24	553.355.000	506.805.000	91,59%
7.	Pelaksanaan Tugas Musyawarah Pimpinan					
	Rp. 630.800.000	Rp. 562.246.900	89,13	930.800.000	570.053.500	61,24%
Hak Keuangan Dan Administrasi Dewan (Layanan Administrasi Anggota Dewan)						
1.	Administrasi Keanggotaan Dewan					
	-	-	-	Rp.6.209.010.000	Rp.942.318.000	15,18%
2.	Administrasi Kesekretariatan Fraksi					
	-	-	-	Rp.7.362.325.000	Rp.5.312.828.000	72,16%
Dukungan Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan						
❖ Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh Tim DPR RI						
1.	Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua					

	Rp. 2.476.551.000	Rp. 1.456.073.050	58,79	Rp.2.396.498.000	Rp.674.251.800	28,13%
2.	Tim Penguatan Diplomasi Parlemen					
	Rp. 296.760.000	77.600.000	26,15	Rp.1.199.952.000	-	-
3.	Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)					
	296.760.000	Rp. 0	0	Rp.956.101.000	-	-
4.	Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan					
	Rp. 2.213.344.000	Rp. 1.252.494.376	56,59	Rp.2.504.985.000	Rp.1.379.767.600	55,08%
5.	Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia					
	4.262.565.000	1.138.362.000	26,71	Rp.3.306.169.000	Rp.3.193.140.000	96,58%
6.	Tim Implementasi Reformasi DPR RI					
	Rp. 438.480.000	Rp. 118.600.000	27,05	Rp.2.436.802.000	Rp.350.170.000	14,37%
7.	Tim Open Parlemen Indonesia					
	-	-	-	Rp.2.906.912.000	Rp.351.409.500	12,09%
8.	Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanggulangan Bencana					
	2.915.477.000	Rp. 818.633.000	28,08	Rp.1.639.789.000	Rp.1.449.249.900	88,38%
9	Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji					
	-	-	-	Rp.752.735.000	-	-
❖ Pelaksanaan Tugas Pimpinan Lainnya						
1	Rp. 1.675.276.000	Rp. 1.135.844.600	67,80	Rp.2.214.426.000	Rp.1.739.413.800	78,55%

Dukungan anggaran terhadap kegiatan kedewanan merupakan hal yang harus mutlak ada. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI. Terdapat beberapa tim anggarannya tersedia, namun tim tersebut tidak efektif dan tidak melakukan kegiatan sehingga tidak ada anggaran yang terserap.

Tabel 22 Capaian Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen (Satker Setjen)

NO	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2020		ALOKASI ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2021	
		ANGGARAN	%		ANGGARAN	%
Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan						
1.	Fasilitas Biro Kesekretariatan Pimpinan					
	1.272.916.000	1.232.222.900	96,80	Rp.2.350.368.000	Rp.2.312.198.000	98,38%
2.	Fasilitas Persidangan Ketua					
	-	-	-	Rp.7.640.000	Rp.6.400.000	83,77%
3.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan					
	-	-	-	Rp.6.180.000	Rp.6.090.000	98,54%
4.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan					
	8.280.000	3.450.000	41,67	Rp.5.830.000	Rp.5.600.000	96,05%
5.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan					
	-	-	-	Rp.3.550.000	Rp.2.940.000	82,82%
6.	Fasilitas Persidangan Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat					
	-	-	-	Rp.6.350.000	Rp.6.330.000	99,69%
7.	Fasilitas Persidangan Badan Musyawarah					
	100.260.000	93.562.000	93,32	Rp.353.665.000	Rp.341.876.000	96,67%
8.	Fasilitas Persidangan Musyawarah Pimpinan					
	53.462.000	35.964.087	67,27	Rp.123.685.000	Rp.116.715.000	94,36%
9.	Fasilitas Tata Usaha Pimpinan Setjen					
	1.331.560.000	1.236.146.400	92,83	Rp.4.271.438.000	Rp.4.094.628.394	95,86%
10.	Fasilitas Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi					
	-	-	-	Rp.1.044.264.000	Rp.1.005.218.200	96,26%

DIPA merupakan hasil transformasi dari dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas DIPA berkaitan erat dengan perencanaan anggaran. Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip ekonomis berarti memperhatikan kepatasan penggunaan input, sedangkan prinsip efisien membandingkan *input* atas *output*, dan prinsip efektif, yaitu membandingkan *outcome* atas *output*.

Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat akan memberikan keleluasaan gerak terhadap rencana kerja Pimpinan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya, ketersediaan dukungan anggaran merupakan hal yang harus mutlak ada untuk terlaksananya kegiatan Pimpinan DPR RI. Pengalokasian anggaran di Biro Kesekretariatan Pimpinan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pimpinan DPR dan Pimpinan Setjen DPR RI. Dan sebaliknya ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya terjadi sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun.

Oleh sebab itu dengan perencanaan anggaran yang matang akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai program/kegiatan Pimpinan Dewan, dan semakin meningkatkan akurasi perencanaan anggaran yang berdampak semakin baik kualitas serapan anggaran yang proporsional. Selain itu, pelaksanaan perencanaan anggaran juga atas arahan dan kebijakan Pimpinan DPR RI.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Biro Kesekretariatan Pimpinan telah melaksanakan perjanjian kinerja, baik Perjanjian Kinerja Satker Dewan maupun Perjanjian Kinerja Satker Setjen. Adapun capaian kinerja dari Satker Dewan Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dari tabel berikut.

Tabel 23 Capaian Kinerja Satker Dewan

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan UU dan Kebijakan Pemerintah oleh DPR RI	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan	6 rekomendasi kebijakan	5 rekomendasi kebijakan	83,33%
2.	Keputusan Pimpinan DPR RI	Jumlah rekomendasi kebijakan Pimpinan DPR RI	40 rekomendasi kebijakan	53 rekomendasi kebijakan	132,5%

Sementara, capaian kinerja dari Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 24 Capaian Kinerja Satker Setjen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Dukungan Sekretariatan Pimpinan	1. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan DPR RI	100%	100%	100%
	3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai standar	100%	100%	100%
	4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan	3,31	3,13	94,56%
	5. Persentase realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan	92,5%	96,64%	104,47%
Total				99,80%

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Satker Setjen Biro Kesekretariatan Pimpinan dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu mencapai 99,80%. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh tersebut masih perlu terus ditingkatkan guna merespons tuntutan dukungan kepada DPR RI yang semakin dinamis. Meskipun adanya Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, capaian kinerja dari Biro Kesekretariatan Pimpinan juga dapat dikatakan cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan arahan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Setjen DPR RI. Capaian kinerja tersebut terlihat, baik dari aspek kuantitas (jumlah) maupun aspek kualitas (mutu). Artinya, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa seluruh kegiatan berkorelasi langsung dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2021.

Adapun beberapa langkah mendatang yang akan dilakukan oleh Biro Kesekretariatan Pimpinan dalam meningkatkan kinerjanya, antara lain:

1. Terus mengoptimalkan dukungan kesekretariatan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI secara profesional.
2. Terus mengoptimalkan dukungan persidangan Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan sesuai dengan standard yang berlaku.
3. Terus mengoptimalkan pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi secara tertib.
4. Terus mengupayakan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan dukungan, baik kepada Pimpinan DPR RI maupun kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 10 Januari 2022

Kepala Biro Kesekretariatan
Pimpinan,

Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP 197111051998031002



BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI